

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA SKPD**

Kinerja suatu organisasi dapat tergambarkan dengan jelas melalui ukuran-ukuran kualitatif dan kuantitatif dari suatu kinerja utama organisasi bersangkutan. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Depok Nomor : 821.29/73/Kpts/Ortala/Huk/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Depok juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Formulasi
1	Predikat SAKIP Satpol PP	Penilaian dari bobot Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja
2	Persentase Aset Satpol PP kondisi baik	Jumlah Aset Satpol PP yang dimiliki dan digunakan dibagi Jumlah Kebutuhan Aset Satpol PP yang dibutuhkan dikali 100
3	Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP	Jumlah Aparatur Satpol PP yang memiliki kompetensi DIBAGI Jumlah Aparatur Satpol PP secara keseluruhan DIKALI 100
4	Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal	Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan DIBAGI Jumlah Perda yang dilaporkan/dipantau DIKALI 100
5	Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib	Jumlah titik pantau Rawan Trantibum yang ditertibkan DIBAGI Jumlah titik pantau pelanggaran Rawan Trantibum yang tidak tertib DIKALI 100
6	Cakupan Rasio Petugas Linmas	Jumlah Satuan Linmas DIBAGI Jumlah RT
7	Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif	Jumlah Anggota Mitra Kerja Satpol PP yang berpartisipasi (dlm pelaksanaan kegiatan) DIBAGI Jumlah Anggota Mitra Kerja Satpol PP disediakan DIKALI 100
8	Cakupan Rasio Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat	Banyaknya kelompok patroli dikalikan 3 kali patroli dalam sehari DIBAGI Banyaknya kelompok kecamatan